



# Bantul & Gunungkidul Kurang Cepat

JOGJA-Pemda DIY meminta pemerintah kabupaten terutama Bantul dan Gunungkidul agar menggenjot capaian vaksinasi. Dua daerah itu dinilai lambat dibanding kabupaten/kota lain di DIY.

Ujang Hasanudin, Yosef Leon, Catur Dwi Janati  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

- ▶ Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY cakupan vaksinasi sampai 5 Oktober 2021 sebesar 83,91%.
- ▶ Satgas Covid-19 Bantul belum akan melakukan vaksinasi *door to door* untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi.

Desakan agar kedua daerah itu mempercepat vaksinasi bertujuan agar DIY segera turun dari level 3 ke level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kami sudah mendorong kabupaten yang masih kurang untuk diperbanyak yang sentra vaksin, kan lebih mudah karena nanti masyarakat datang sendiri ke puskesmas. Di puskesmas saya kira sudah cukup, fasilitas sudah ada, Internet sudah ada, tenaga kesehatan bisa *nyambi*. Kalau ada vaksinasi massal juga enggak apa-apa kerja sama pihak lain," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Rabu (6/10).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY cakupan vaksinasi sampai 5 Oktober 2021 sebesar 83,91 % atau 2.416.424 orang dari total sasaran sebanyak 2.879.699 untuk dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua cakupan mencapai 51,85 % atau 1.493.198 orang. Khusus vaksinasi lansia sudah mencapai 60,62 % atau sekitar 300.834 orang dari sasaran 472.852 orang.

Secara umum capaian vaksinasi per kabupaten dan kota, Jogja tertinggi yang sudah mencapai 100% dari total sasaran, bahkan saat ini Pemkot Jogja sudah mulai menysar warga luar Jogja yang beraktivitas di Jogja. Capaian tertinggi kedua, Sleman 78,46%, Kulonprogo 74,68%, Bantul 67,11 %, dan Gunungkidul 66,76 %.

▶ Halaman 4

### Bantul & Gunungkidul...

Menurut Baskara Aji, capaian vaksinasi lansia yang masih rendah perlu digenjut kembali. "Satgas penebalan nakes juga bisa membantu menjemput lansia atau warga yang mengalami kesulitan mobilitas untuk divaksin," kata Baskara Aji.

Vaksinasi menjadi salah satu indikator penurunan level PPKM. Indikator lainnya yakni angka kematian, *positivity rate*, *bed occupancy rate*, serta angka kesembuhan pasien.

#### Door to Door

Ketua Harian Satgas Covid-19 Bantul, Joko Purnomo, mengaku belum akan menggelar vaksinasi *door to door* untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi dari daerah lain. "Baru didiskusikan. Kami harus menghitung jumlah nakes," katanya.

Joko lebih mendorong inovasi pemerintah kalurahan dalam menggenjut vaksinasi.

Pemkab Bantul, kata Joko, menargetkan minimal 85% warga divaksin bulan ini. "Pertama kami bersinergi dengan TNI dan Polri dan Pemda DIY untuk ketersediaan vaksin. Kedua, memberdayakan seluruh elemen terutama pak lurah, pak panewu untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya yang belum vaksin bisa ikut vaksinasi," katanya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Sunaryanta berjanji akan mempercepat vaksinasi ke masyarakat.

Salah satunya dengan menggalakkan vaksinasi massal yang melibatkan lintas sektor, mulai dari TNI-Polri, BIN, hingga pihak swasta. Ia menambahkan percepatan

vaksinasi difokuskan untuk penyuntikan dosis pertama.

#### Ubah Strategi

Pemerintah Kota Jogja mengubah strategi vaksinasi, yang dulunya fokus pada warga yang ber-KTP Jogja, kini targetnya seluruh warga yang beraktivitas di wilayah itu mesti sudah divaksin. "Artinya semua yang beraktivitas di Kota Jogja harus kami vaksin agar tercipta *herd immunity*. Sebab virus ini menyebar bukan dibatasi kepemilikan KTP, tetapi tingkat interaksi," kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi.

Heroe menyatakan cakupan vaksinasi kian diperluas dengan menyasar para pelaku perdagangan, pelaku wisata, pelayan publik dan tenaga kesehatan. Tak luput pula para pelajar, santri, dan mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya yang kerap melakukan aktivitas harian di kawasan tersebut.

Menurut Heroe, cakupan vaksinasi berkaitan dengan penurunan level PPKM tidak bisa hanya dilihat berdasarkan capaian vaksin dari wilayah Kota Jogja saja. Sebagai wilayah aglomerasi, konektivitas DIY saling terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sleman, Novita Krisnaeni, menjelaskan Sleman masih berada di level 3 PPKM, disebabkan capaian vaksinasi, terutama dosis kedua yang belum memenuhi target.

Selain itu, masih banyaknya pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit serta

terdapat kasus kematian akibat Covid-19. "Ketika kasusnya sudah turun tetapi yang dirawat di rumah sakit masih banyak dan yang meninggal masih ada 4,4 persen maka ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama," jelas Novita.

Dinkes, lanjut dia, tetap gencar melaksanakan vaksinasi sebagai salah upaya untuk mencegah penularan sehingga kasusnya tidak banyak. Dia berharap dengan kesadaran masyarakat yang peduli terhadap 3T, 3M, dan vaksinasi level PPKM di Sleman dapat turun.

#### Tren Membaik

Sementara itu, *positivity rate* kasus Covid-19 di DIY terus menurun dan penambahan kasus sembuh lebih banyak dari jumlah penambahan kasus baru. *Positivity rate* per 6 Oktober ini berada di posisi 0,59%. Sehari sebelumnya berada di angka 0,64%.

"*Positivity rate* harian per 6 Oktober 2021 sebesar 0,59 persen," kata Kabag Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji.

Dia mengatakan tambahan kasus baru per 6 Oktober ini sebanyak 45 kasus berdasarkan pemeriksaan sampel harian sebanyak 7.612 sampel.

Ditya menyampaikan terjadi penambahan kasus sembuh sebanyak 108 kasus. Dengan begitu, persentase kesembuhan DIY atau *case recovery rate* tercatat 95,92%.

Kasus meninggal dunia tercatat empat kasus, sehingga tingkat kematian kasus menjadi sebesar 3,36%. Adapun keterisian tempat tidur atau *bed*, untuk kritikal sebesar 26,92% dan nonkritikal 13,81%. (Hafti Yudi Suproba, David Kurniawan, Abdul Hamid Razak & Sugeng Pranyoto)

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005